



IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT (Studi Standar Pelayanan Minimal RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008)

Rahiman Dani¹⁾; Septi Eriani²⁾; Henny Aprianty²⁾; Heru Purnawan^{*1)}

¹⁾ Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

²⁾ Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

*Email Korespondensi: shane.purnawan@gmail.com

How to Cite :

Dani, R., Eriani, S., Aprianty, H., Purnawan, H. (2024) IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT (Studi Standar Pelayanan Minimal RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008). SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities. 5(2). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.5.2.109-118>

ARTICLE HISTORY

Received [24 September 2024]

Revised [05 October 2024]

Accepted [10 November 2024]

Published [30 Decemebr 2024]

KEYWORDS

Implementation, Service Standards, Hospital.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Menganalisis status penerapan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Pintu Harapan Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008; 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar pelayanan minimal di rumah sakit RSUD. Harapan dan Doa Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan gejala yang terjadi saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan serta validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan minimal di RS Pintu Harapan Kota Bungkulu sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori George Edward III. Artinya, (1) aspek komunikasi berhasil dan pelaksana melaksanakannya dengan jelas dan konsisten untuk mempengaruhi tujuan kebijakan dan memahami isi kebijakan; Tujuan dan sasaran kebijakan. (2) Aspek sumber daya terdiri atas jumlah sumber daya perangkat, fitur dan kemampuan perangkat. Meski jumlah sumber daya mencukupi, namun beberapa lokasi di rumah sakit mempunyai beberapa pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang sesuai. Meskipun fasilitas dan perlengkapannya cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. (3) Dengan didukung sikap dan perilaku aparatur pada saat pelaksanaan kebijakan SPM, aspek disposisi menunjukkan peningkatan yang sangat baik. (4) Aspek struktur birokrasi melalui standar operasional prosedur dan prosedur (SOP) SPM sudah terkendali dengan baik, namun hanya perlu ditingkatkan konsistensinya melalui aturan yang lebih ketat.

ABSTRACT

This research was conducted with the following objectives: 1.

Analyzing the status of implementation of minimum service standards at Pintu Harapan Hospital, Bengkulu City based on Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129 of 2008; 2. To find out the factors that influence the implementation of minimum service standards in RSUD hospitals. The hopes and prayers of the City of Bengkulu are based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 129 this year. The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach. This research is descriptive research which aims to collect information about current conditions and symptoms. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation methods. Data analysis techniques use data reduction, data presentation (data presentation), and drawing conclusions and validation. The results of this research indicate that the implementation of minimum service standards at Pintu Harapan Hospital, Bengkulu City is very good. This can be seen from the factors that interact and influence policy implementation based on George Edward III's theory. This means, (1) the communication aspect is successful and implementers implement it clearly and consistently to influence policy objectives and understand the policy content; Policy goals and objectives. (2) The resource aspect consists of the number of device resources, device features and capabilities. Even though the number of resources is sufficient, several locations in the hospital have several employees with inappropriate educational backgrounds. Although the facilities and equipment are quite good, there is still room for improvement. (3) Supported by the attitudes and behavior of the apparatus during the implementation of the SPM policy, the disposition aspect shows very good improvement. (4) Aspects of the bureaucratic structure through SPM standard operating procedures and procedures (SOP) are well controlled, but consistency only needs to be improved through stricter rules.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak setiap manusia ditinjau dari Pasal 28 H UUD 1945 dan UU WHO Tahun 1948. UU No. 23 Tahun 1992 sangat penting untuk mencapai hak-hak dasar Semua orang India. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia di bidang kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan pelayanan publik (Triyanto et al., 2021).

Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu merupakan salah satu rumah sakit yang ada di kabupaten Bengkulu telah menerapkan standar pelayanan minimal rumah sakit. Mengingat pentingnya pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kota Bengkulu, maka seluruh pegawai RSUD Harapan dan Door Kota Bengkulu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk segera menjamin kepuasan masyarakat luas dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Seluruh India Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia di bidang kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu kepada seluruh masyarakat. Pembangunan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan pelayanan publik. Rumah Sakit Doa Harapan Kota Bengkulu merupakan salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bengkulu fokus memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, jajaran RSUD Pintu Harapan Kota Bengkulu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, benar, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat, sekaligus memastikan bahwa semua harus tetap terjangkau oleh kelompok masyarakat Tentang perbedaan status.

Untuk mengatasi standar minimal tersebut, maka penting bagi RS Harapan dan RS Doa Kota Bengkulu untuk memiliki tenaga kerja berkualitas yang mampu menjawab segala kekurangan dan tuntutan di bidang kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,

penting bagi RS Harapan dan RS Doa Kota Bengkulu sebagai lembaga pemerintah daerah di bidang kesehatan yang melayani masyarakat setempat, untuk senantiasa berupaya meningkatkan potensi tenaga kerja yang ada. Memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan pelayanan Kualitas didasarkan pada standar yang ditetapkan dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Tujuan dari standar pelayanan minimum ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai memberikan pedoman yang seragam kepada pemerintah daerah dalam mempersiapkan perencanaan dan pengelolaan, pemantauan dan pertanggungjawaban pelaksanaan standar pelayanan daerah.

Mengingat pentingnya pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kota Bengkulu, maka seluruh pegawai RSUD Harapan dan Door Kota Bengkulu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk segera menjamin kepuasan masyarakat luas dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bengkulu akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pintu Harapan Kota Bengkulu dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat luas dan melaksanakan berbagai kegiatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 . Standar minimal pelayanan rumah sakit. Namun bukti di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan di bidang kesehatan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga menemui berbagai kendala dalam mencapai tujuan operasional yang optimal. Berikut status capaian masing-masing bangsal RS Pintu Harapan Kota Bengkulu untuk standar pelayanan minimal tahun 2022.

Tabel 1. Rekapitan Capaian Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu

No	Unit Kerja	Target Jumlah SPM Per Unit Kerja	Realisasi Capaian Jumlah SPM Per Unit Kerja	%
1	2	3	4	5
1	KINERJA PELAYANAN :	4800	4700	97,92
	a. IGD	8,00	8,00	100,00
	b. Rawat Jalan	8,00	8,00	100,00
	c. Rawat Inap	11,00	11,00	100,00
	d. Bedah Central/Kamar Operasi	7,00	7,00	100,00
	e. Persalinan	5,00	5,00	100,00
	f. Perinatologi	1,00	0,00	0,00
	g. Intensif/ICU	2,00	2,00	100,00
	h. Rehabilitasi Medik	3,00	3,00	100,00
	i. Transfusi Darah	2,00	2,00	100,00
	j. Pelayanan Pasien BPJS	1,00	1,00	100,00
2	KINERJA PENUNJANG PELAYANAN :	4600	4300	93,48
	a. Radiologi	4,00	4,00	100,00
	b. Laboratorium	4,00	4,00	100,00
	c. Farmasi	5,00	4,00	80,00
	d. Gizi	3,00	3,00	100,00
	e. Rekam Medik	4,00	2,00	50,00
	f. Kesling/Pengolahan Limbah	2,00	2,00	100,00
	g. Ambulance	2,00	2,00	100,00
	h. Pemulasaran Jenazah	1,00	1,00	100,00
	j. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	3,00	3,00	100,00
	i. Laundry	2,00	2,00	100,00
	k. Administrasi Manajemen	9,00	9,00	100,00
	l. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	7,00	7,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN SPM RUMAH SAKIT		94,00	90,00	95,74

Dari rekapan capaian jumlah standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2022 diatas ditemukan masih ada beberapa bagian yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana mestinya. Untuk Implementasi kebijakan SPM pelayanan perinatologi Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr, bayi yang lahir dengan berat badan 1500 gr – 2500 gr hanya mampu ditangani 95,83% belum tercapai dari target 100% yang ditetapkan. Sedangkan untuk SPM instalasi farmasi terdiri dari lima Indikator yaitu Waktu tunggu obat racikan dan tidak campuran, tidak ada kesalahan pengobatan, dan kesesuaian resep dengan resep rumah sakit, kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan pelabelan obat high alert dan kepuasan pelanggan.

Dari lima indikator pada tahun 2022 hanya empat yang sesuai dengan target, sedangkan untuk indikator yang tidak tercapai adalah kejadian kesalahan pemberian obat yang hanya tercapai sebesar 99,83% dari target 100%. Berarti masih terdapat kesalahan dalam pemberian obat. Untuk pelayanan rekam medic ada empat Indikator: kelengkapan pengisian rekam medis dalam waktu Dalam waktu 24 jam setelah selesai pelayanan, melengkapi informed consent setelah menerima informasi dan menyerahkan rekam medis untuk pelayanan rawat jalan dalam waktu 1 jam 15 menit dan rawat inap pasien jalan < 15 menit. Adapun capaian implementasi kebijakan SPM pelayanan instalasi rekam medik tahun 2022 Rekam medis harus diselesaikan dalam waktu 24 jam setelah pelayanan selesai tidak tercapai dari standar nasional yang ditetapkan sebesar 100% data tidak tersedia. Informed consent tidak selesai setelah menerima informasi yang jelas tercapai dari standar nasional yang ditetapkan sebesar 100%, data tidak tersedia. Waktu penyerahan rekam medis pelayanan rawat inap dicapai dengan nilai kinerja rata-rata 06 menit 25 detik, sedangkan waktu penyerahan rekam medis rawat jalan melebihi 10 menit 12 menit 15 detik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk “mengetahui penerapan standar pelayanan minimal di RS Harapan Doa Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 Tahun 2008”.

Penelitian ini fokus pada penerapan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Studi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang No. 129 Tahun 2008 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Metode penelitian menjelaskan urutan kegiatan penelitian, yaitu metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Hal terpenting yang harus menjadi fokus peneliti adalah penggunaan metode yang sesuai dengan proyek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengetahui metode penelitian yang baik kita dapat melakukan penelitian yang efisien, efektif dan sistematis (Purnawan, 2021).

Penelitian ini dilakukan di daerah Harapan dan Doa Harapan Kota Bengkulu, subjek dan latar belakang yang diteliti diolah dengan baik dan dipadukan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari sifat laporan autentik peneliti – autentik, sebagaimana tertulis. Sebagaimana disebutkan di tempat penelitian masih merupakan penelitian kualitatif (Herdyansah, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi penggunaan teknik wawancara yang tepat dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis rumusan masalah penelitian (Purnawan, 2020). Menurut (John W. Creswell, 2012) penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam situasi, proses, individu, atau kelompok tertentu. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks pada

pemahaman konteks dan menyediakan penjelasan yang komprehensif untuk fenomena yang sedang dipelajari.

Menurut (Sugiyono 2017), Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, maka metode pengumpulan data menjadi sangat penting dalam penelitian. Tanpa memahami metode pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan (Purnawan et al., 2023). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Observasi adalah metode mengamati dan mencatat secara sistematis tanda-tanda yang terjadi dalam suatu proyek.. (Andi Prastowo 2016).
2. Wawancara, teknik wawancara menurut (Lexy J. Moleong 2009) Ini adalah percakapan yang bermakna antara kedua pihak – pewawancara dan responden – untuk menjawab pertanyaan.
3. Perlu diketahui, cara tertulis ini akan dijadikan sebagai bukti pendukung pelaksanaan data pelayanan rumah sakit terkecil di RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Rumah Sakit Harapan dan Doa di Kota Bengkulu dapat dikatakan menerapkan standar pelayanan minimal RS Harapan & Doa Kota Bengkulu sangat baik.

Faktor-faktor yang mendukung temuan ini antara lain:

- 1) Komunikasi yang efektif, pelaksanaan yang jelas dan konsisten oleh penyelenggara, relevan dengan tujuan kebijakan, dan pemahaman terhadap Kebijakan dan tujuan.
- 2) Untuk sumber daya, mencakup banyak sumber daya perangkat keras, kapasitas dan kemampuan peralatan. Sumber daya yang tersedia cukup, namun masih banyak pegawai yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan di banyak bidang rumah sakit. Fasilitas dan perlengkapannya sudah bagus, namun fasilitasnya perlu ditingkatkan.
- 3) Dari sisi penawaran, terdapat perbaikan positif yang didukung oleh sikap dan perilaku perusahaan dalam menerapkan kebijakan SPM.
- 4) Birokrasi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM dan ditingkatkan kepatuhannya terhadap peraturan yang lebih ketat..

Berdasarkan pada data hasil wawancara dengan para narasumber diatas, maka dalam subbab ini akan dijelaskan lebih lanjut data yang dikumpulkan sebelumnya dengan didukung oleh teori-teori yang sesuai dengan pembahasan.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit di RSUD Harapan dan Doa Kota.

Untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Harapan dan Doa, model atau teori yang diusulkan oleh George C. Edward III digunakan. Data yang dikumpulkan untuk pelaksanaan ini berasal dari wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan berbagai sumber tertulis atau tertulis. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah penerapan standar pelayanan rendah di RS Harapan dan Doa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah layak untuk mempertimbangkan penerapan standar pelayanan minimum di RSUD Pakatan Harapan dan Doa kota Bengkulu konsisten dengan gagasan Edward III.

Komunikasi

George C. Edward III menyatakan bahwa Para pengambil kebijakan perlu Tahu bagaimana menerapkan kebijakan bahwa transmisi merupakan peran yang pertama.

Perintah dan keputusan—keputusan kebijakan harus diberikan kepada para pelaksana sebelum Menindaklanjuti. Oleh karena itu, para pemimpin harus mengkonfirmasi keputusan tersebut telah dibuat dan perintah telah dikeluarkan untuk dilaksanakan sebelum mereka dapat menerapkan keputusan kebijakan. Semakin akurat Berkomunikasi, memberikan keputusan dan melaksanakan perintah kepada mereka yang bertanggung jawab melaksanakannya, semakin besar kemungkinan mereka dilakukan (Ismayanti, 2020)

Penelitian Nursalim menunjukkan Komunikasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik ketika pengambil keputusan memahami tanggung jawab mereka. Pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan dapat membantu. Perintah eksekusi dan kebijakan harus dilaporkan dengan benar Pergi ke Sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan komunikasi Anda harus singkat, jelas, dan konsisten. (Nursalim, 2017). Hambatan umum yang dihadapi transmisi komunikasi dibagi menjadi dua, menurut Edward III (Sawitri et al., 2019). Pertama, implementasi kebijakan dan mandat pembuat kebijakan saling bertentangan. Konflik-konflik ini menciptakan perbedaan dan mempersulit komunikasi. Kedua, saat mentransfer data melalui lapisan hierarki birokrasi, informasi dapat menjadi membingungkan. Ketiga, masalah retensi pengetahuan juga berasal dari persepsi dan ketidakmampuan penyelenggara untuk merespons kebutuhan kebijakan. (Budi, 2008). Dalam penelitian ini, elemen transmisi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal telah dikomunikasikan dengan baik dan efektif.

Pertemuan dan rapat dengan bagian atau bidang terkait telah digunakan untuk menyebarkan kebijakan untuk menerapkan standar pelayan minimal ini. Bagian atau bidang terkait melakukan sosialisasi kebijakan melalui pertemuan dan fokus grup diskusi. Sosialisasi ini dapat diterima dengan mudah dan konsisten. Selain itu, Anda dapat menghubungi bagian atau bidang yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal jika Anda masih mengalami kesulitan dalam menerapkan standar ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi tentang pelaksanaan standar pelayanan minimal Di RS Harapan dan Doa Kota Bengkulu, program tersebut sudah terlaksana sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor seperti: penyampaian (bagaimana pesan dikirimkan kepada pemangku kepentingan), konsistensi pesan kebijakan dan kejelasan pesan.

Sumber Daya

Edwar III menyatakan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan Hal ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya. Sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya. Realisasi bakat harus cukup dan mampu menerapkan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sumber daya manusia tidak boleh menyalahgunakan wewenang mereka untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena infrastruktur dan sarana yang tersedia untuk menerapkan kebijakan yang akan digunakan, pelaksanaan kebijakan tersebut akan didukung secara langsung (Aneta, 2010).

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam implementasi kebijakan. Seringkali hal ini disebabkan oleh staf atau penempatan staf yang tidak memadai, tidak memadai atau tidak efektif. Lebih banyak staf dan relawan tidak akan menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan. Namun jumlah pekerja akan memenuhi syarat dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kebijakan atau memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh kebijakan itu sendiri. Ada dua jenis informasi implementasi kebijakan: Yang pertama adalah informasi penegakan kebijakan. Jika seorang mediator disuruh melakukan sesuatu, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Kedua, data terkait kepatuhan operator terhadap undang-undang dan

peraturan negara bagian harus dicatat. Para pelaksana kebijakan harus memastikan bahwa pihak lain yang terlibat dalam penerapan kebijakan mematuhi hukum. Untuk implementasi yang efektif, kepemilikan harus efektif. Wewenang memberikan wewenang atau wewenang kepada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan. Tanpa kewenangan atau kewenangan publik terhadap pelaksana, maka proses implementasi kebijakan dapat terhambat. Namun, karena kekuasaan diskresi dapat digunakan dalam situasi yang berbeda, terdapat banyak kesalahan dalam mengevaluasi efektivitas kekuasaan tersebut. Agar kebijakan menjadi efektif, kekuasaan harus efektif. Namun jika karyawan menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, maka efektivitasnya akan menurun. Aspek penting dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas fisik. Sekalipun stafnya cukup, tahu Anda tidak dapat mengimplementasikan suatu kebijakan tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki kewenangan untuk melakukannya, dan memiliki dukungan (sarana dan prasarana) untuk melakukannya (Fauziyah & Arif, 2021).

Berdasarkan hasil survei, pengamanan sumber daya manusia adalah sudah memadai, tetapi perlu diperhatikan bahwa sumber daya manusia harus ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Memang benar bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi Keterampilan dan kemampuan seseorang sesuai dengan latar belakangnya. Namun, untuk menerapkan kebijakan, lebih dari sekedar latar belakang pendidikan seseorang di perusahaan diperlukan Konteks yang lebih luas memerlukan keterampilan dan kompetensi yang dipelajari melalui kursus dan pelatihan tertentu. Selain itu, fasilitas dan prasarana adalah faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Rumah sakit Konteks umum memerlukan keterampilan dan kemampuan yang dipelajari dalam kursus dan pelatihan khusus ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam penelitiannya, Dwi Nurani Jumlah personel kebijakan dan manajemen sumber daya manusia yang memadai mereka memenuhi syarat untuk melaksanakan arahan tersebut. Jumlah pelaksana yang cukup dan memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pedoman Yang diputuskan adalah sumber daya manusia memenuhi kualifikasi tersebut. Jika tidak ada pelaksana yang berkualitas, Memiliki kredit yang cukup dan memenuhi persyaratan untuk memenuhi pedoman. Personel pelaksana yang memadai dengan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan berkualitas akan menghambat pelaksanaan kebijakan (Dwi Sadono, 2009).

Anggaran penting dalam implementasi kebijakan karena membutuhkan Memberikan dana atau investasi dalam jumlah besar bagi Suatu program atau kebijakan yang menjamin terlaksananya suatu kebijakan karena tanpa dukungan finansial yang memadai maka kebijakan tersebut tidak akan efektif dalam mencapai tujuannya. Edward III mengatakan bahwa "studi terhadap Kota Baru menunjukkan bahwa kurangnya insentif pemerintah adalah alasan utama kegagalan proyek tersebut," dan (Takaluhude et al., 2022) Eduardo III de Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya keuangan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaku kebijakan kurang, selain program tidak dapat dijalankan secara optimal (Takaluhude et al., 2022).

Menurut informasi yang dikumpulkan dari wawancara, peneliti menemukan bahwa latar belakang pendidikan dan keterampilan Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat keberhasilan penerapan standar pelayanan yang rendah di rumah sakit. Selain itu, fasilitas sarana yang ada memiliki dampak pada pelaksanaan standar pelayanan minimal

Disposisi

Merupakan program atau kebijakan yang menjamin terlaksananya kebijakan tersebut karena tanpa dukungan finansial yang memadai maka kebijakan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya. Hal ini menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika pelatih dalam keadaan baik maka pemegang kebijakan dapat melaksanakan kebijakan sesuai keinginannya. Positioning memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebab, dalam bekerja ia perlu mengetahui dan memahami politik (Budi, 2007).

Dedikasi terhadap penelitian ini sangat penting. Tunjukkan komitmen dengan melihat alasan penyedia melakukan penerapan, tujuan atau perubahan apa yang ingin dicapai, dan perubahan apa yang dilakukan untuk menerapkan standar pelayanan minimal di RS Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan masyarakat menerima layanan yang berkualitas. Keterlibatan pegawai RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu menunjukkan bahwa mereka mendukung SPM. Kesuksesan Kebijakan ditentukan oleh upaya semua pihak untuk mendukung implementasinya.

Di RS Harapandoa Bengkulu, terdapat tiga macam sikap atau perilaku pekerja berdasarkan prinsip yaitu kekuatan gagasan dan perilaku pengguna program dalam hal penerimaan atau penolakan. Dengan membandingkan ketiga jenis tanggapan tersebut dengan apa yang diungkapkan para informan, kita dapat menyimpulkan bahwa sikap pegawai berpengaruh positif terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu telah menunjukkan bahwa komitmen mereka untuk menerapkan kebijakan ini sudah baik dan optimal

Birokrasi

Menurut Edwar III de Leo Agustino (2012), implementasi kebijakan harus dilakukan dengan mendefinisikan tanggung jawab untuk setiap pekerjaan dan memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) diterbitkan. Jalan ini mudah dan menstandardisasi cara pembuatan kebijakan melakukan pekerjaannya. Prosedur yang terkandung dalam prosedur operasi standar (SOP) ini dirancang agar sesuai dengan masa lalu dan perubahan kebijakan rentan karena tidak dapat merespons situasi atau rencana baru. Akibatnya, SOP tersebut seringkali menghambat implementasi kebijakan baru yang memerlukan proses kerja atau organisasi baru untuk menerapkan strategi tersebut. SOP bisa lebih sulit diterapkan jika ada kebijakan yang mengharuskan perubahan prosedur operasional (Leo, 2012).

SOP memungkinkan sumber daya masukan kebijakan menjalankan fungsinya sesuai standar yang ditentukan dalam SOP, sehingga meningkatkan efisiensi implementasi dan tingkat produktivitas. Berdasarkan hasil wawancara masing-masing bagian dan bidang masing-masing di Rumah Sakit memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) dan menjalankan SOP tersebut sesuai dengan SOP. Dengan adanya SOP, para pelaksana tentunya akan seragam dalam bekerja.

Jika digabungkan dengan informasi hasil wawancara maka dapat dikatakan Dengan dibuatnya SOP SPM berarti implementasi kebijakan akan efektif karena merupakan standar yang dapat diikuti oleh para pelaksana.

RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu telah membuat SOP yang sesuai dengan SPM. Oleh karena itu, berdasarkan data dan wawancara yang dikumpulkan dari penelitian ini, kebijakan SPM telah dibuat dan disosialisasikan dengan baik kepada staf Rumah Sakit Harapan dan Agama Kota Bengkulu. Oleh karena itu, kebijakan SPM dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab staf RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008

Faktor-faktor yang menghambat dan menghambat implementasi kebijakan SPM di Puskesmas Pakatan Harapan dan Doa Kota Bengkulu dapat dijelaskan dengan teori Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, struktur kantor dan konfigurasi. Untuk tujuan informasi sudah berjalan dengan baik antara pihak Manajemen dengan pihak pelaksana kegiatan. Komunikasi yang disampaikan sudah sangat optimal, jelas dan konsisten sehingga untuk pelaksanaan SPM di rumah sakit sudah berjalan dengan baik. Jadi, isu-isu ini mencakup manusia, informasi, listrik, dan fasilitas. Untuk dari dimensi staff atau sumber daya manusia terdapat kekurangan SDM yang terlatih yang disebabkan masih adanya penerimaan pegawai atau karyawan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga masih menyebabkan pencapaian Indikator SPM di pelayanan rekam medic belum sesuai dengan target.

Pada disposisi yang dijalankan rumah sakit sudah kondusif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa setiap pelaksana kegiatan mendukung atas kebijakan – kebijakan yang sudah ditetapkan. Setiap bagian sudah terlibat dalam pelaksanaan SPM ini.

Selanjutnya, pada factor struktur organisasi sudah baik ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa untuk setiap pelaksanaan kegiatan sudah mempunyai SOP dimana setiap bagian atau bidang Anda sudah mengetahui peran utama dan tanggung jawab setiap orang. Edward III mengatakan dalam Winarno (2008) jenis struktur jabatan mempengaruhi implementasi kebijakan, tanggung jawab kebijakan didistribusikan kepada beberapa lembaga yang berbeda, oleh karena itu kelompok harus diorganisir secara berbeda. Oleh karena itu, struktur organisasi yang baik dan koordinasi multipihak dapat mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan SPM suatu rumah sakit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan standar pelayanan minimal di RS Harapan dan Doa Kota Bengkulu dapat dikatakan bahwa penerapan standar pelayanan minimal di RS Harapan dan Doa Kota Bengkulu sangat baik.

Faktor-faktor yang mendukung temuan ini antara lain:

1. Komunikasi yang efektif, pelaksanaan yang jelas dan konsisten oleh penyelenggara, relevan dengan tujuan kebijakan, dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Untuk sumber daya, meliputi jumlah sumber daya peralatan, kapasitas dan kemampuan peralatan. Sumber daya yang tersedia cukup, namun masih banyak pegawai yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan di banyak bidang rumah sakit. Fasilitas dan perlengkapannya sudah bagus, namun fasilitasnya perlu ditingkatkan.
3. Dari sisi penawaran, terdapat perbaikan positif yang didukung oleh sikap dan perilaku perusahaan dalam menerapkan kebijakan SPM.
4. Birokrasi berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM dan ditingkatkan kepatuhannya terhadap peraturan yang lebih ketat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Puskesmas Harapan dan Doa Kota Bengkulu perlu meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam kaitannya

- dengan standar pelayanan minimal. Apabila keadaan memungkinkan sebaiknya menambah sumber daya manusia yang ada dan memperbaiki fasilitas yang ada.
2. Perlunya standarisasi standar pengelolaan dan metode pelaksanaan SPM
 3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ini untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang penerapan standar pelayanan minimal di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- Budi, W. (2008). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*.
- Dwi Sadono. (2009). Perkembangan Pola Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 7(2), 246404.
- Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Herdyansah, H. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In *Jakarta: Salemba Humanika*.
- Ismayanti. (2020). *Dasar-Dasar Pariwisata (Sebuah Pengantar)*. 1–184.
- John W. Creswell. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Nursalim, N. (2017). Profesionalisme Guru Sd / Mi. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 20(2), 250–256. <https://doi.org/10.24252/lp.2017v20n2i10>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Mardianto, Noviyanto, H., & Darmawi, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA PADANG BINJAI KECAMATAN TETAP KABUPATEN KAUR. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(2), 288–296.
- Sawitri, E., Astiti, M. S., & Fitriani, Y. (2019). Hambatan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 202–213.
- Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangehe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. *Governance*, 2(2), 1–14.
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G., Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center , Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.